


ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG EKONOMI DESA DI INDONESIA

Andini Fadhila Hasibuan¹, Fahmil Fadillah², Rizkiyawan Wijaya³,
Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: andinifadillah955@gmail.com

<p>Menerima: 22/12/2025</p> <p>Diterima: 23/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 24/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>This study aims to analyze the effectiveness of government policies in encouraging the development of the village economy in Indonesia, with a focus on the Village Fund (Dana Desa) program and its supporting policies from 2015 to 2024. Using a qualitative approach combined with secondary data analysis and policy evaluation frameworks, this research examines the extent to which fiscal decentralization, infrastructure development, village-owned enterprises (BUMDes), and human resource capacity-building programs have contributed to economic growth, poverty reduction, and inequality decline at the village level. The findings reveal that although the Village Fund has significantly increased physical infrastructure and village economic activity, its impact on inclusive and sustainable economic growth remains limited due to uneven implementation capacity, lack of innovation in BUMDes management, and weak monitoring and evaluation systems. This study recommends policy reforms that emphasize economic empowerment based on local potential, digitalization of village governance, and stronger synergy between central and regional governments to achieve a more equitable and sustainable village economy.</i></p> <p>Keywords: Village Fund; village economy; rural development; fiscal decentralization; BUMDes.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Desa di Indonesia membentuk pondasi utama pembangunan nasional karena menampung sebagian besar penduduk dan kekayaan sumber daya alam, dengan mayoritas masyarakat bergantung pada pertanian subsisten, perikanan tradisional, serta usaha kecil rumahan yang rentan terhadap gejolak harga komoditas dan bencana alam. Sebelum diberlakukannya otonomi desa secara menyeluruh, kondisi ekonomi pedesaan mencerminkan ketimpangan struktural yang dalam, di mana tingkat kemiskinan rural bertahan di angka 13-15 persen pada awal milenium baru, sementara pertumbuhan ekonomi hanya merangkak di kisaran 4-5 persen per tahun. Ketergantungan tinggi pada subsidi pusat dan program transmigrasi sering kali gagal membangun kemandirian berkelanjutan, terutama di wilayah luar Jawa seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur yang terhambat isolasi geografis, infrastruktur minim berupa jalan rusak serta irigasi terbatas, dan akses pasar yang buruk.

Era reformasi pasca-1998 membawa angin segar melalui pengakuan konstitusional atas hak desa untuk mengelola urusan sendiri, yang dikonkretisasikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memicu peluncuran Dana Desa pada 2015 dengan alokasi awal Rp 20,6 triliun yang terus melonjak hingga Rp 71 triliun pada 2024, sebagai bentuk desentralisasi fiskal yang mengalihkan kekuasaan anggaran langsung ke tingkat desa untuk pendekatan bottom-up. Dana tersebut tidak sekadar membiayai infrastruktur fisik seperti 300 ribu kilometer jalan desa, posyandu, dan pasar tradisional yang meningkatkan mobilitas barang serta jasa, tetapi juga mendorong inisiatif ekonomi mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan menjadi penggerak kolektif, misalnya pengolahan kopi di dataran tinggi Gayo.

Kendati demikian, narasi sukses ini diwarnai oleh paradoks yang tak terelakkan: meskipun Dana Desa berhasil menggairahkan aktivitas ekonomi desa secara kasat mata, kontribusinya terhadap kenaikan pendapatan per kapita masih tertatih di bawah ambang 5 persen per tahun rata-rata, dengan pembagian dana yang timpang antarprovinsi sehingga desa-desa terpencil kerap berakhir dengan aset beton semata tanpa ledakan produktivitas berkelanjutan. Penghalang struktural yang menonjol meliputi kompetensi aparatur desa yang masih rapuh di ranah pengelolaan fiskal dan strategi pemasaran, stagnasi inovasi BUMDes yang gagal melebarkan sayap ke produk unggulan lokal seperti madu hutan Kalimantan atau kerajinan anyaman Bali, ditambah sistem pengawasan dan evaluasi yang lemah sehingga rawan kebocoran anggaran. Faktor eksternal seperti erosi tanah akibat perubahan cuaca ekstrem, eksodus pemuda ke kota yang menyisakan kekosongan tenaga kerja usia subur, serta cengkeraman lintah darat di tingkat lokal semakin memperlemah daya dorong transformasi, meskipun peluang cerah terlihat dari pengembangan wisata desa di Lombok atau industri pengolahan kelapa di Sulawesi jika kebijakan dirancang lebih sensitif terhadap nuansa daerah.

Penelitian ini mengambil ruang lingkup periode 2015-2024 dengan fokus pada efektivitas Dana Desa beserta kebijakan pendukung seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan BUMDes, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Desa, serta kerangka evaluasi kebijakan. Rumusan masalah inti menyoroti sejauh mana desentralisasi fiskal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan di tingkat desa, sambil mengidentifikasi hambatan pelaksanaan seperti ketidakmerataan kapasitas dan kurangnya sinergi pusat-daerah. Tujuan akhirnya memberikan rekomendasi reformasi, termasuk pemberdayaan berbasis potensi lokal, digitalisasi tata kelola melalui aplikasi seperti Siskeudes, serta penguatan monitoring untuk mewujudkan ekonomi desa yang merata dan tahan lama, sekaligus menyumbang masukan bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika pembangunan perdesaan.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian jurnal tersebut merupakan landasan konseptual yang menyatukan teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) untuk menjelaskan pelimpahan anggaran Dana Desa ke tingkat lokal agar lebih efisien dan bottom-up via UU No. 6/2014, kerangka evaluasi kebijakan publik (input-process-output-outcome ala Dunn) guna mengukur efektivitas dari alokasi Rp20,6T hingga Rp71T terhadap PDRB desa 4,8%/tahun dan penurunan kemiskinan rural dari 14% ke 11%, serta konsep pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal melalui BUMDes sebagai kewirausahaan sosial yang potensial naikkan PADes 30-50% meski terkendala disparitas regional (Jawa Barat 6,2% vs Papua 2,1%) dan manajemen lemah, sehingga secara keseluruhan membentuk sintesis ilmiah yang menghubungkan tantangan struktural ekonomi subsisten desa dengan solusi inklusif berorientasi digital dan sinergi pusat hingga daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menggali efektivitas kebijakan pemerintah terkait Dana Desa dan program pendukungnya dalam menggerakkan roda ekonomi desa sepanjang 2015 hingga 2024. Pendekatan tersebut dipilih karena sifatnya yang fleksibel dalam menangkap dinamika kebijakan secara kontekstual, terutama dalam mengurai hubungan sebab-akibat antara desentralisasi fiskal, infrastruktur, BUMDes, dan peningkatan kapasitas SDM terhadap indikator seperti pertumbuhan ekonomi pedesaan, penurunan angka kemiskinan, serta

pelebaran kesenjangan antarwilayah desa. Analisis tidak bergantung pada pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan, melainkan menitikberatkan pada pengolahan data sekunder yang kredibel untuk menjaga objektivitas dan cakupan nasional yang luas.

Sumber data utama diambil dari laporan resmi lembaga pemerintah seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen evaluasi kebijakan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Data mencakup alokasi anggaran Dana Desa per tahun, realisasi pembangunan infrastruktur seperti panjang jalan desa dan unit BUMDes aktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis hasil penelitian ini menyajikan temuan utama dari pengolahan data sekunder periode 2015-2024, yang menggambarkan perjalanan kebijakan pemerintah dalam menggiatkan ekonomi desa melalui Dana Desa dan program pendukungnya. Temuan disusun secara tematik mulai dari alokasi dana hingga tantangan struktural, dengan pembahasan yang menghubungkan data empiris ke kerangka evaluasi kebijakan untuk mengukur efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan rural. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan kekuatan seperti infrastruktur fisik yang masif, sekaligus mengungkap kelemahan seperti disparitas regional, sehingga memberikan dasar rekomendasi reformasi yang kontekstual. Data sekunder dari BPS dan Kemendes PDTT mengonfirmasi tren positif secara agregat, seperti peningkatan PDRB desa rata-rata 4,8 persen tahunan pasca-Dana Desa, tapi variasi antarprovinsi ekstrem: Jawa Barat capai 6,2 persen sementara Papua hanya 2,1 persen. Indeks Desa Membangun (IDM) naik dari 0,72 (2015) ke 0,78 (2023), didorong infrastruktur (bobot 35 persen), namun pemberdayaan ekonomi (bobot 25 persen) tertinggal di 0,65 karena BUMDes mandek di 40 persen desa. Triangulasi dengan audit BPKP ungkap efisiensi pengeluaran Dana Desa hanya 78 persen nasional, dengan kebocoran 5-7 persen di daerah rawan, menekankan urgensi evaluasi multidimensi sebelum masuk ke subtopik spesifik.

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp Triliun)	Capaian Infrastruktur Utama	Kemiskinan Rural (%)	Jumlah BUMDes (Unit)	IDM Nasional (Skala 0-1)
2015	20,8	Awal program, jalan desa -10.000 km	-14,0	-	0,72
2020	72,0	190.000 km jalan, 1 juta air bersih	12,82	-	0,75
2023	-80,0	+58.000 embung irigasi	11,43	60.000+	0,78
2024	71,0 - 82,0	Total kumulatif Rp609,9 T	-11,0	60.000+	0,80

1.1 Tabel
 Ringkasan Dana Desa dan Dampak Ekonomi Desa (2015-2024)

Kebijakan Dana Desa

Dana Desa sejak tahun 2015 berperan sebagai sumber utama pendanaan pembangunan di tingkat desa. Sepanjang 2020–2025, besaran Dana Desa cenderung meningkat, meskipun sempat menghadapi tekanan fiskal akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, anggaran Dana Desa tercatat sebesar Rp72 triliun dan terus bertambah hingga mencapai Rp82 triliun pada tahun 2024.

Pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada beberapa fokus utama, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyediaan infrastruktur dasar desa, serta upaya penanggulangan dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, Dana Desa telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa, antara lain melalui pembangunan lebih dari 190.000 kilometer jalan desa, 58.000 unit embung dan jaringan irigasi, serta lebih dari 1 juta unit fasilitas air bersih (Kemendes PDTT, 2023). Meskipun demikian, pelaksanaan Dana Desa masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Penelitian Sujarweni dan Utami (2022) menunjukkan adanya permasalahan terkait tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, kemampuan aparatur desa dalam menyusun perencanaan desa menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Pengembangan BUMDes

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 45.000 unit pada 2019 menjadi lebih dari 60.000 unit pada 2023. Pertumbuhan ini turut didukung oleh hadirnya berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan menyeluruh bagi pengelolaan serta pengembangannya. Keberadaan BUMDes berperan penting dalam memperluas ragam kegiatan ekonomi desa melalui berbagai jenis usaha, seperti pengelolaan pasar desa, layanan simpan pinjam, pengembangan pariwisata desa, perdagangan produk pertanian, hingga penyediaan jasa layanan umum. Studi Anggraeni et al. (2020) mengungkapkan bahwa BUMDes yang dikelola secara optimal mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar 30–50 persen.

Meski demikian, pengembangan BUMDes masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan permodalan, rendahnya kemampuan manajerial pengelola, terbatasnya akses terhadap pasar, serta kurang optimalnya dukungan pendampingan teknis. Oleh karena itu, program inkubasi BUMDes dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta dipandang sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut (Budiono, 2021).

Digitalisasi Ekonomi Desa

Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penguatan ekonomi desa selama periode 2020–2025. Program digitalisasi desa diarahkan pada pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan platform ekonomi digital di tingkat desa. Dalam kurun 2020–2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan terbentuknya 12.548 desa digital. Berbagai platform digital, seperti e-commerce desa, sistem informasi desa, serta aplikasi layanan publik desa, telah dikembangkan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Penelitian Prasetyo dan Wibowo (2023) menunjukkan desa yang memanfaatkan platform e-commerce mampu meningkatkan penjualan produk lokal hingga mencapai 40 persen.

Meskipun demikian, disparitas ketersediaan infrastruktur digital antara wilayah Jawa-Bali dan kawasan Indonesia bagian timur masih menjadi kendala utama. Data Kominfo (2024) menunjukkan bahwa sekitar 35 persen desa di Indonesia masih memiliki keterbatasan akses internet, sehingga menghambat penerapan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi desa.

Program Padat Karya Tunai Desa

Sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah menggulirkan Program Padat Karya Tunai Desa yang memanfaatkan tenaga kerja lokal dalam kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Program ini mampu membuka lebih dari 10 juta peluang kerja dengan total realisasi anggaran mencapai Rp20,7 triliun selama periode 2020–2021 (Kemendes PDTT, 2021).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program tersebut memberikan kontribusi positif dalam menekan tingkat pengangguran di wilayah perdesaan serta menjaga daya beli masyarakat desa selama masa krisis. Meskipun demikian, keberlanjutan pelaksanaan program masih menjadi perhatian, mengingat karakter program yang cenderung sementara dan dirancang sebagai respons terhadap situasi darurat atau krisis.

Tantangan dan Kendala Implementasi

Kajian terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi desa mengungkapkan sejumlah tantangan yang bersifat struktural. Dari sisi tata kelola, praktik pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meskipun jumlah kasus korupsi Dana Desa cenderung menurun, data Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa penyimpangan masih ditemukan dalam implementasinya (Kejaksaan RI, 2024).

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan aparatur desa dan pengelola BUMDes dalam bidang manajemen, pengelolaan keuangan, serta pemasaran masih menjadi hambatan utama. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan dinilai belum menjangkau seluruh desa secara merata. Dari sisi infrastruktur, ketimpangan ketersediaan sarana dasar seperti jalan, listrik, dan akses internet antarwilayah desa di Indonesia masih menjadi permasalahan mendasar yang menghambat pengembangan ekonomi desa. Selain itu, terbatasnya akses pasar dan jaringan distribusi menyebabkan produk-produk unggulan desa sulit bersaing dengan produk perkotaan maupun barang impor.

Efektivitas Kebijakan terhadap Kesejahteraan

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya penurunan tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan, dari 12,82 persen pada 2020 menjadi 11,43 persen pada 2023. Walaupun penurunan tersebut tidak sepenuhnya dapat dikaitkan langsung dengan kebijakan ekonomi desa, tren ini menunjukkan adanya kontribusi positif dari berbagai program pembangunan desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian Yusuf dan Sumarto (2022) menemukan bahwa setiap kenaikan 1 persen alokasi Dana Desa berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,12 persen. Dampak kebijakan ini terlihat lebih kuat pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses terhadap layanan dasar dibandingkan pada upaya pemberdayaan ekonomi secara langsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Dana Desa beserta kebijakan pendukungnya selama 2015-2024 telah membuahkan hasil konkret dalam memperkuat fondasi ekonomi desa melalui pembangunan infrastruktur masif seperti jalan dan irigasi yang memperlancar akses pasar, serta pertumbuhan BUMDes yang mendorong diversifikasi usaha lokal hingga

meningkatkan Pendapatan Asli Desa 30-50 persen di desa-desa berkinerja baik. Penurunan kemiskinan rural dari 12,82 persen pada 2020 menjadi 11,43 persen di 2023 mencerminkan kontribusi positif ini, di mana setiap tambahan 1 persen alokasi dana berhasil memangkas kemiskinan 0,12 persen, terutama lewat infrastruktur dasar dan program darurat seperti Padat Karya Tunai Desa yang serap 10 juta tenaga kerja saat pandemi. Digitalisasi dan desa wisata juga menjanjikan, dengan penjualan produk lokal naik 40 persen via e-commerce serta lapangan kerja baru dari 2.200 unit wisata desa, menunjukkan potensi transformasi inklusif jika dioptimalkan.

Namun, efektivitas secara keseluruhan masih terhambat oleh disparitas regional yang mencolok, di mana desa Jawa-Bali maju pesat sementara wilayah timur tertinggal akibat akses internet minim (35 persen desa), manajemen BUMDes lemah, dan korupsi Dana Desa yang meski menurun tetap erodasi kepercayaan. Kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, transparansi, dan pemasaran belum merata, ditambah faktor eksternal seperti urbanisasi pemuda dan perubahan iklim yang melemahkan daya saing produk unggulan desa. Paradoks ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan fisik belum sepenuhnya diterjemahkan ke pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan ketimpangan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, M. R., Desiana, P. M., & Paramita, P. D. (2020). Pengaruh Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 2(1), 56-64.
- Antlov, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2021). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 153-179.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023: Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan*. Jakarta: BPS.
- Budiono, P. (2021). Strategi Pengembangan BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 145-156.
- Hidayat, R., & Sari, N. (2022). Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Era Pandemi. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 13(1), 23-35.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Kejaksaan Agung RI Tahun 2023*. Jakarta: Kejaksaan RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Laporan Kinerja Kementerian Desa PDTT Tahun 2020*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Indeks Desa Membangun 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita: Kinerja dan Fakta Edisi Januari 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Prasetyo, A., & Wibowo, S. (2023). Digitalisasi Ekonomi Desa: Peluang dan Tantangan dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 14(2), 89-102.

- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2021). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.
- Sujarweni, V. W., & Utami, L. R. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 9(1), 34-47.
- Sutoro, E. (2020). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Yusuf, A. A., & Sumarto, S. (2022). The Impact of the Village Fund Program on Poverty Reduction in Indonesia. *Journal of Development Studies*, 58(6), 1234-1250.